

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Struktur perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian karena Indonesia merupakan negara agraris. Pembangunan nasional dan pembangunan pertanian saling berkaitan, di mana upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dimulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk para petani kecil yang selama ini menjadi pelaku utama sektor pertanian namun umumnya memiliki keterbatasan lahan dan modal sehingga hasil usahatani hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Susanto *et al.*, 2022).

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan pertanian. Apabila pemerintah dan para perencana pembangunan benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka upaya tersebut harus berfokus pada peningkatan taraf hidup kelompok terbesar yang bekerja di sektor pertanian. Langkah ini dapat dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan maupun tanaman perdagangan, atau melalui kebijakan yang memungkinkan petani memperoleh harga yang lebih baik atas hasil yang mereka produksi (Payung & Paraeng, 2020).

Sektor pertanian mencakup lima subsektor utama, yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan. Di antara subsektor tersebut, tanaman pangan dan hortikultura memiliki peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hortikultura merupakan salah satu pertanian yang berfokus pada kegiatan budidaya tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Subsektor ini berperan penting dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, sehingga memerlukan perhatian yang serius dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan, permintaan terhadap produk hortikultura cenderung terus mengalami peningkatan (Azizi, 2025).

Pengembangan usaha pertanian memerlukan ketersediaan modal yang cukup besar, sementara tidak semua petani memiliki akses yang memadai terhadap sumber pembiayaan. Akses modal yang baik berperan penting dalam meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani sehingga berdampak positif pada perekonomian nasional. Kondisi keterbatasan tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan kredit pertanian yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani (Rozci & Laily, 2023).

Produksi usahatani pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam pengalokasian faktor-faktor produksi. Peningkatan produksi dapat dicapai apabila penggunaan faktor produksi dilakukan secara lebih efisien dan optimal. Dalam konteks tersebut, ketersediaan modal yang memadai menjadi faktor penting bagi petani dalam menjalankan kegiatan usahatani, karena modal memungkinkan petani untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai input produksi secara tepat. Dengan dukungan modal yang cukup, petani tidak hanya dapat mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi, tetapi juga mampu meminimalkan berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses produksi usahatani (Guswardi, 2020).

Modal merupakan faktor penting yang dipertimbangkan petani sebelum menjalankan kegiatan usahatani (Hernanto, 1989). Keterbatasan modal menyebabkan petani hanya mampu menggunakan input produksi dalam jumlah dan kualitas minimal, sehingga kapasitas produksi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya kemampuan membeli sarana produksi berkualitas berdampak pada efisiensi penggunaan input dan menurunkan produktivitas hasil pertanian, yang tercermin dari kecilnya jumlah panen. Kondisi hasil panen yang rendah kemudian berpengaruh pada pendapatan petani, sehingga mereka sulit melakukan akumulasi modal karena sebagian besar pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya beban biaya hidup membuat sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk konsumsi, bukan untuk pengembangan modal usahatani (Nikmah, 2018).

Selain itu, petani pada umumnya memandang bahwa proses pengajuan pinjaman ke lembaga perbankan bersifat rumit dan memerlukan waktu yang

relatif lama. Persepsi tersebut muncul akibat terbatasnya informasi yang dimiliki petani mengenai prosedur dan persyaratan kredit perbankan. Kondisi ini mendorong perlunya keberadaan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh petani serta menawarkan tingkat bunga yang relatif rendah. Kemudahan akses terhadap permodalan diharapkan dapat membantu pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan skala usahanya. Namun demikian, sebagian besar petani masih mengandalkan modal sendiri dalam membiayai kegiatan usahatani, yang mencerminkan bahwa peran lembaga keuangan dalam penyaluran modal ke sektor pertanian masih tergolong rendah. Akibatnya, petani menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal (Hutahaean, 2024).

Menurut Hernanto (1989), sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan pada dasarnya berasal dari beberapa sumber, yaitu dana yang berasal dari masyarakat sendiri, lembaga keuangan nonformal, program kredit pemerintah, serta lembaga keuangan formal seperti bank swasta dan koperasi. Beragamnya sumber pembiayaan tersebut memberikan alternatif bagi petani dalam memperoleh tambahan modal untuk mendukung kegiatan usahatani. Ketersediaan modal sangat penting karena memungkinkan petani memenuhi kebutuhan sarana produksi dan menerapkan teknologi budidaya yang lebih baik, sehingga produktivitas usahatani dapat ditingkatkan.

Kredit memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Peran ini tidak terlepas dari karakteristik petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan terbatas, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pemupukan modal secara mandiri. Akses terhadap kredit menjadi salah satu cara bagi petani untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan dalam menjalankan usahatani. Semakin besar akses petani terhadap fasilitas kredit, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk membeli sarana produksi dan mengadopsi teknologi budidaya yang lebih efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi usaha tani (Dai *et al.*, 2019).

Kebijakan kredit pertanian memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, memperbaiki pendapatan petani, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu,

kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung diversifikasi usaha pertanian dan memperluas akses petani terhadap sumber pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kredit pertanian mencakup beberapa aspek penting, seperti ketersediaan kredit yang memadai, tingkat suku bunga yang terjangkau, fleksibilitas dalam skema pembiayaan, dukungan teknis bagi petani, serta mekanisme evaluasi dan pemantauan kredit. Penerapan seluruh aspek tersebut secara terpadu sangat diperlukan agar dukungan finansial yang diberikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani (Rozci & Laily, 2023).

Subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan dua subsektor dalam pembangunan pertanian karena berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan kegiatan usahatani pada kedua subsektor tersebut sangat bergantung pada ketersediaan modal, karena setiap tahapan budidaya memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor produksi. Modal dibutuhkan sejak tahap persiapan lahan, pengadaan benih atau bibit, pembelian pupuk dan pestisida, pembayaran tenaga kerja, hingga kegiatan panen dan pascapanen. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan petani memperoleh sarana produksi dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat sehingga kegiatan budidaya dapat berlangsung secara optimal (Hernanto, 1989).

Kebutuhan modal pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura juga menjadi penting karena proses produksi pertanian memerlukan pengeluaran biaya yang dilakukan sebelum petani memperoleh hasil panen. Selama masa budidaya, petani harus mengeluarkan biaya secara terus-menerus, sedangkan penerimaan dari hasil usahatani baru diperoleh setelah panen. Kondisi tersebut sering menyebabkan petani mengalami keterbatasan modal kerja, terutama apabila sumber pembiayaan hanya mengandalkan dana sendiri. Akibatnya, petani berpotensi mengurangi penggunaan faktor-faktor produksi, menunda kegiatan budidaya, atau menggunakan input di bawah dosis yang dianjurkan, sehingga produktivitas usahatani menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, ketersediaan

modal menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran proses produksi dan pencapaian hasil usahatani (Suratijah, 2015).

Penyaluran kredit usahatani dalam pembangunan perdesaan tercermin melalui distribusi dana PUAP yang dikelola oleh LKM-A, yang menunjukkan bahwa lembaga ekonomi perdesaan diharapkan mampu mengelola serta mengembangkan program tersebut sebagai layanan pembiayaan bagi petani. Keberadaan LKM-A diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan usahatani, meningkatkan pendapatan petani, dan selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa. Program ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lembaga ekonomi perdesaan seperti LKM-A sebagai unit usaha Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Tujuan utama PUAP, yaitu memperkuat akses petani terhadap modal finansial, menjadi dasar pemberian dana bergulir kepada Gapoktan untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan pembiayaan usahatani (Zuhelmi *et al.*, 2025).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam bentuk dana bergulir (*revolving fund*). Setiap petani penerima manfaat berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut kepada LKMA agar dana dapat digulirkan kembali kepada anggota Gapoktan lainnya. Pembentukan LKMA pada Gapoktan pelaksana PUAP dilakukan melalui lima tahapan, yaitu proses identifikasi, validasi profil Gapoktan, penilaian kelayakan dan potensi pembentukan LKMA, transformasi unit usaha Gapoktan menjadi lembaga permodalan LKMA, serta tahap implementasi dan pengembangannya (Hilal *et al.*, 2014).

Pembentukan LKM-A memiliki tujuan utama untuk meningkatkan akses petani terhadap berbagai skema pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya, sehingga kebutuhan permodalan usahatani dapat lebih mudah terpenuhi. Keberadaan LKM-A juga diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi usahatani maupun usaha ternak sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, LKM-A berperan dalam memperkuat perekonomian perdesaan melalui pengembangan lembaga ekonomi lokal seperti Gapoktan. Secara khusus, LKM-A berfungsi menyediakan modal

usaha bagi petani yang membutuhkan, sehingga mereka tidak harus bergantung pada lembaga pemberi pinjaman informal yang seringkali merugikan petani (Hutahaean, 2024).

Ketersediaan pembiayaan bagi petani tidak selalu menjamin bahwa dana yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberi pembiayaan. Dalam praktiknya, petani sebagai rumah tangga produsen sekaligus konsumen sering kali menghadapi berbagai kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi secara bersamaan. Akibatnya, dana pembiayaan yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan usahatani, tetapi sebagian dapat dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, maupun usaha lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya mengetahui bagaimana alokasi penggunaan dana pembiayaan oleh petani, karena pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal berpotensi mengurangi efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan kinerja usahatani. Oleh karena itu, analisis terhadap alokasi penggunaan dana menjadi langkah awal yang penting untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan benar-benar dimanfaatkan sebagai modal produktif dalam kegiatan pertanian (Ashari, 2009).

Kondisi tersebut juga sejalan dengan teori fungibilitas (*fungibility theory*) yang dikemukakan oleh Pischke & Adams (1980) yang menjelaskan bahwa uang merupakan sumber daya yang bersifat saling menggantikan (*fungible*), sehingga dana yang diterima dari suatu sumber tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian dana. Meskipun dalam teori ekonomi uang dianggap memiliki nilai yang sama tanpa membedakan sumbernya (fungibilitas), teori ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya individu justru memperlakukan uang secara berbeda berdasarkan asal atau tujuan penggunaannya.

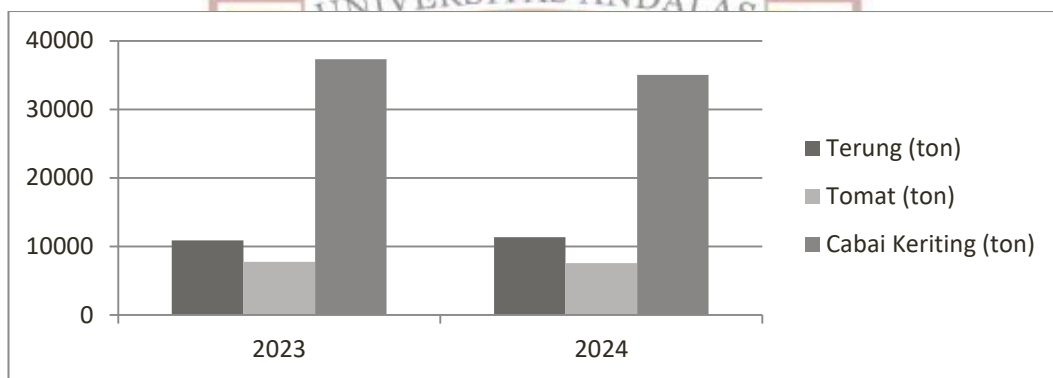
Fungibilitas kredit merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran kredit mikro, yaitu ketika dana pembiayaan yang semula ditujukan untuk kegiatan produktif dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga tujuan utama pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas usaha menjadi kurang optimal (Chandio *et al.*, 2018). Fungibilitas kredit sering terjadi pada penyaluran kredit usahatani, yaitu pinjaman yang seharusnya digunakan

untuk membiayai usahatani, kemudian dialihkan penggunaannya untuk membiayai konsumsi, kesehatan, atau keperluan rumah tangga lainnya (Saqib *et al.*, 2017).

Fungibilitas kredit dapat menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika dana kredit yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan produktif dialihkan untuk kebutuhan lain, maka manfaat pembiayaan sebagai penguat modal usaha menjadi kurang optimal. Akibatnya, tujuan utama pemberian kredit dalam meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha berpotensi tidak tercapai. Menurut Taswan (2011), penyaluran kredit yang baik harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu aman, terarah, dan memberikan manfaat ekonomi. Prinsip aman menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Prinsip terarah berarti dana kredit dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Sementara itu, prinsip memberikan manfaat ekonomi mengandung makna bahwa penyaluran kredit tidak hanya memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan debitur serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan kredit yang sesuai dengan tujuan produktif menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembiayaan.

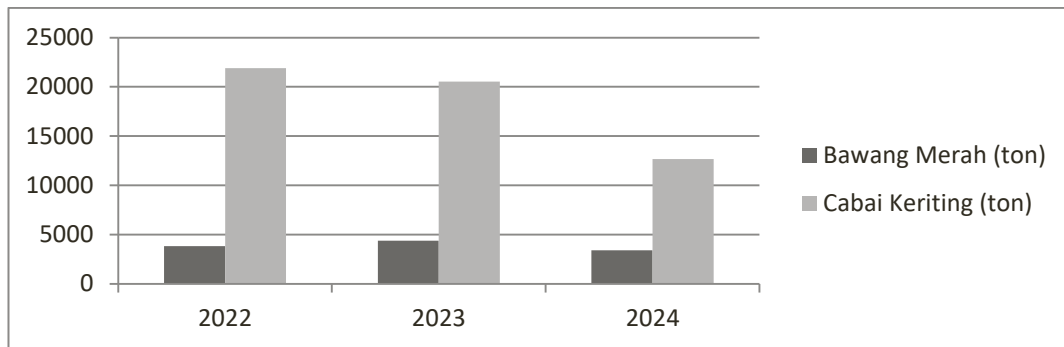
Pemberian kredit pertanian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan modal usahatani sehingga kegiatan budidaya dapat dilakukan secara lebih optimal. Namun, keberhasilan suatu program pembiayaan tidak cukup dinilai dari jumlah kredit yang disalurkan atau banyaknya petani yang menerima pembiayaan, melainkan perlu dibuktikan melalui perubahan hasil produksi yang diperoleh petani setelah memanfaatkan kredit tersebut. Oleh karena itu, analisis perbedaan produksi sebelum dan sesudah menerima kredit menjadi penting untuk mengetahui perubahan produksi usahatani setelah petani memperoleh pembiayaan dari LKM-A. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah pembiayaan benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan hasil usahatani atau hanya menjadi tambahan modal tanpa memberikan perubahan yang berarti terhadap produksi (Ashari, 2009).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 pada Sumatera Barat Dalam Angka, produksi padi Kabupaten Agam sebesar 143.981,17 ton atau sekitar 10,6% dari total produksi padi Sumatera Barat dengan luas panen 29.755,10 ha atau sekitar 10% dari total luas panen Sumatera Barat (Lampiran 1). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah sentra produksi padi yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Tingginya produksi padi ini juga mencerminkan besarnya potensi sektor pertanian, sehingga pengelolaan faktor produksi, termasuk ketersediaan permodalan dan akses kredit bagi petani, menjadi aspek penting dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produktivitas usahatani padi.



Gambar 1. Produksi Hortikultura (Terung, Tomat, dan Cabai Keriting) Kabupaten Agam 2023-2024

Berdasarkan Gambar 1. Pada tahun 2023, produksi terong di Kabupaten Agam tercatat sebesar 10.870,20 ton dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 11.336,03 ton, menunjukkan adanya peningkatan kinerja produksi. Produksi tomat relatif stabil, yaitu 7.775,51 ton pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 7.568,14 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi cabai keriting tergolong tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, meskipun mengalami penurunan dari 37.336,59 ton pada tahun 2023 menjadi 35.039,64 ton pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Agam memiliki peran strategis dalam penyediaan komoditas hortikultura, khususnya terong, tomat, dan cabai keriting (Lampiran 2). Luas panen di Kabupaten Agam pada tahun 2023–2024 menunjukkan penurunan, yaitu terong dari 720,81 ha menjadi 634,52 ha, tomat dari 583,45 ha menjadi 511,75 ha, serta cabai keriting dari 2.803,91 ha menjadi 2.025,90 ha (Lampiran 3).



Gambar 2. Produksi hortikultura Kecamatan Ampek Angkek

Produksi padi di Kecamatan Ampek Angkek pada tahun 2024 mencapai 19.905,4 ton dengan luas panen sebesar 3.734,6 ha (Lampiran 4). Berdasarkan Gambar 2. Komoditas terung, tomat, dan cabai keriting di Kecamatan Ampek Angkek selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan penurunan luas panen yang diikuti fluktuasi produksi. Luas panen terung menurun dari 65 ha pada tahun 2022 menjadi 47 ha pada 2023 dan kembali turun menjadi 29 ha pada 2024, dengan produksi berkurang dari 12.945 ton menjadi 9.235 ton. Luas panen tomat sempat menurun dari 27 ha pada 2022 menjadi 22 ha pada 2023, kemudian meningkat menjadi 29 ha pada 2024, seiring produksi yang berfluktuasi dari 5.425 ton, turun ke 3.935 ton, lalu meningkat menjadi 5.850 ton. Sementara itu, cabai keriting mengalami penurunan luas panen yang cukup signifikan dari 199 ha pada 2022 menjadi 108 ha pada 2023 dan 60,4 ha pada 2024, yang diikuti penurunan produksi dari 21.899 ton menjadi 12.664,30 ton (Lampiran 5).

Usahatani hortikultura merupakan subsektor pertanian yang membutuhkan modal relatif besar karena penggunaan sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, serta tenaga kerja yang intensif selama proses budidaya. Keterbatasan modal sering menjadi kendala bagi petani dalam memenuhi kebutuhan input produksi secara tepat waktu dan dalam jumlah yang optimal, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas dan produksi usahatani. Menurut Soekartawi (1995), modal merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usahatani melalui penyediaan sarana produksi dan pembiayaan operasional, sedangkan Hernanto (1989) menyatakan bahwa kecukupan modal memungkinkan petani mengalokasikan faktor-faktor produksi secara lebih efisien untuk meningkatkan hasil usahatani. Dalam kondisi tersebut, kredit pertanian menjadi salah satu sumber permodalan yang dapat membantu

petani memenuhi kebutuhan usahatani hortikultura sehingga penggunaan input produksi dapat dilakukan secara optimal. Peningkatan akses terhadap kredit diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani, yang didukung oleh hasil penelitian Mariyono (2019) bahwa akses kredit memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penggunaan input produksi dan hasil usahatani. Oleh karena itu, analisis perbedaan produksi sebelum dan sesudah menerima kredit dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan LKM-A Batu Taba Sepakat mampu meningkatkan produksi usahatani hortikultura anggotanya.

Analisis perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi pada subjek yang sama. Menurut Santoso (2019), Paired Sample t-Test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran yang berasal dari objek yang sama tetapi dilakukan pada dua kondisi yang berbeda, sehingga dapat diketahui apakah perubahan yang terjadi bersifat signifikan secara statistik. Sejalan dengan itu, Siregar (2023) menjelaskan bahwa uji komparatif berpasangan digunakan ketika peneliti ingin menguji adanya perbedaan kondisi sebelum dan sesudah suatu perlakuan pada sampel yang sama. Dengan demikian, analisis perbedaan produksi sebelum dan sesudah menerima kredit menjadi pendekatan yang tepat untuk menilai apakah pembiayaan yang diberikan oleh LKM-A telah memberikan perubahan nyata terhadap produksi usahatani anggota.

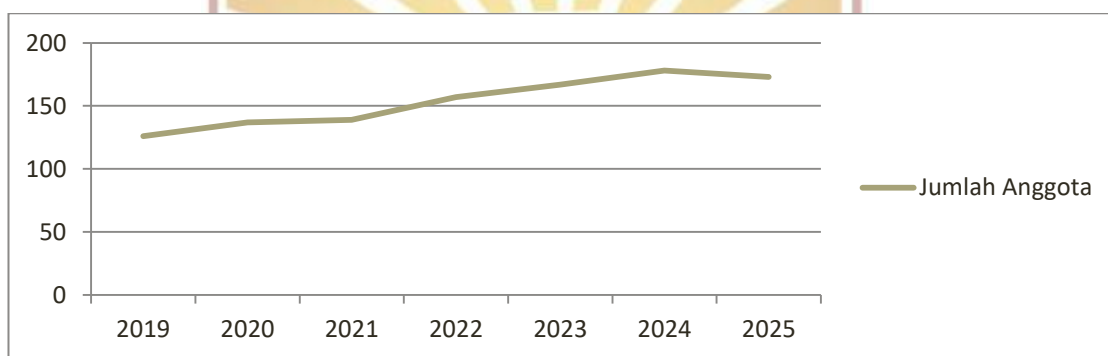
Penggunaan *Paired Sample t-Test* dalam penelitian ini dipilih karena data produksi diperoleh dari petani yang sama sebelum dan sesudah menerima kredit dari LKM-A. Melalui uji ini, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan rata-rata produksi secara deskriptif, tetapi juga memberikan bukti statistik mengenai apakah perubahan tersebut signifikan (Priyatno, 2018).

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 101 Gapoktan PUAP di Sumatera Barat tahun 2024 (Lampiran 6). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Agam memiliki kelembagaan petani yang cukup kuat dan aktif dalam mengelola kegiatan ekonomi perdesaan. Keberadaan LKM-A

dalam jumlah besar mengindikasikan tingginya partisipasi kelompok tani dalam penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan usaha produktif di tingkat nagari. Hal ini juga mencerminkan peran strategis Kabupaten Agam dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Sumatera Barat.

Permasalahan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi petani di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Untuk itu, keberadaan LKM-A Batu Taba Sepakat memegang peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi petani di nagari tersebut.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Anggota LKM-A Batu Taba Sepakat 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3, jumlah anggota LKM-A Batu Taba Sepakat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, kemudian sedikit menurun pada tahun 2025. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa LKM-A tetap menjadi lembaga pembiayaan yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya petani di Nagari Batu Taba Sepakat. Keanggotaan LKM-A Batu Taba Sepakat sejak awal pendiriannya hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sejak mulai beroperasi, jumlah anggota terus bertambah dari tahun ke tahun seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan mikro agribisnis. Berdasarkan data tahun 2025 (Lampiran 7), jumlah anggota LKM-A Batu Taba Sepakat tercatat mencapai 173 orang, di mana sebagian besar merupakan petani yang berdomisili di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek. Dari 173 anggota tersebut pada tahun 2025 yang meminjam kredit pada LKM-A Batu Taba Sepakat sebanyak 125 anggota

yang terdiri dari beberapa sektor yaitu 13 orang sektor pangan, 20 orang sektor hortikultura, 1 orang sektor peternakan, 7 orang sektor pengolahan hasil, 82 orang sektor lain-lain.

Keanggotaan lembaga ini tidak hanya berasal dari satu kelompok, tetapi merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berada di nagari tersebut yaitu terdiri dari tujuh kelompok tani yang tergabung (Kami Saiyo, Kami Sato, Tunas Mekar, Batu Taba Lestari, Bintang Panca, Sungai Katiak Terpadu, Tunas Harapan). Selain itu, sebagian anggota juga berasal dari wilayah sekitar yang masih memiliki keterkaitan ekonomi dengan Nagari Batu Taba. Pertumbuhan jumlah anggota ini menunjukkan bahwa keberadaan LKM-A Batu Taba Sepakat semakin diakui dan dimanfaatkan masyarakat sebagai lembaga pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan usahatani mereka.

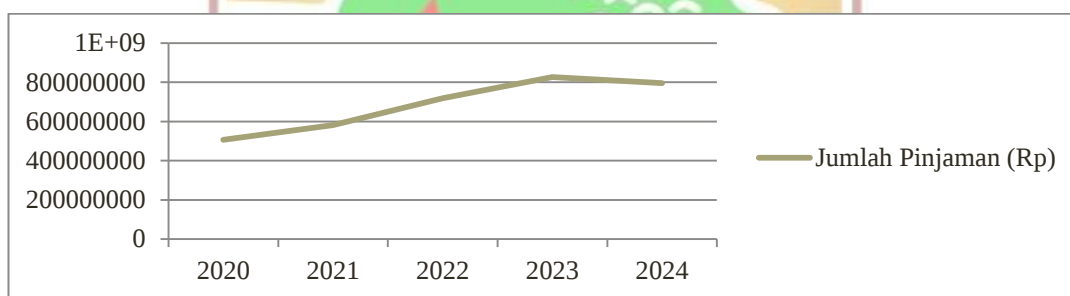
Anggota LKM-A Batu Taba Sepakat merupakan petani yang bergerak pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura dengan komoditas yang diusahakan cukup beragam. Pada subsektor hortikultura, petani mengusahakan komoditas cabai dan bawang, sedangkan pada subsektor tanaman pangan komoditas utama yang diusahakan adalah padi. Perbedaan jenis komoditas tersebut menyebabkan adanya variasi dalam kebutuhan input produksi, pola pengelolaan usahatani, serta tingkat penggunaan modal dan kredit. Kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait bagaimana kredit yang disalurkan oleh LKM-A dimanfaatkan oleh petani dalam mendukung kegiatan usahatani masing-masing komoditas, serta sejauh mana kredit tersebut mampu menunjang penggunaan faktor produksi dan hasil produksi yang diperoleh oleh petani anggota LKM-A Batu Taba Sepakat.

LKM-A Batu Taba Sepakat merupakan lembaga keuangan mikro agribisnis yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat setempat, terutama para pelaku usaha pertanian, sebagai upaya untuk menyediakan solusi terhadap permasalahan permodalan yang sering dihadapi anggotanya. Berdasarkan hasil pra-survei, lembaga ini memiliki pola pengelolaan keuangan yang khas dibandingkan LKM-A lainnya di wilayah yang sama.

Saat ini, LKM-A Batu Taba Sepakat masih menerapkan sistem keuangan konvensional, di mana pendapatan lembaga diperoleh melalui bunga pinjaman dan biaya jasa dari transaksi pembiayaan anggota. Namun, lembaga ini sedang

mempersiapkan langkah menuju penerapan sistem keuangan berbasis syariah, yang mengutamakan prinsip bagi hasil antara lembaga dan anggota berdasarkan keuntungan usaha. Perubahan arah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih berkeadilan bagi anggotanya.

LKM-A Batu Taba Sepakat pada mulanya dibentuk sebagai inisiatif masyarakat Nagari Batu Taba untuk menghadirkan lembaga keuangan yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan petani. Pembentukan lembaga ini berangkat dari kondisi di mana banyak petani menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal seperti perbankan, sehingga dibutuhkan suatu lembaga alternatif yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Sejak berdiri, LKMA ini dirancang untuk menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan permodalan yang bersifat berkelanjutan.



Gambar 4. Realisasi Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh LKM-A Batu Taba

Berdasarkan Gambar 4. Persentase kenaikan realisasi jumlah pinjaman yang diberikan menggambarkan laju perubahan jumlah pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh LKM-A Batu Taba Sepakat selama periode 2020–2024 (Lampiran 8). Secara umum, persentase tersebut menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu sebesar 8,36 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 14,84 persen pada tahun 2021, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 23,43 persen, sebelum kembali menurun menjadi 15,09 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan yang cukup signifikan, yang tercermin dari persentase kenaikan yang hanya sebesar 3,77 persen, bahkan disertai penurunan nominal pembiayaan sebesar Rp31.153.467, sehingga total pembiayaan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp795.336.033.

Penyaluran dana kredit LKM-A Batu Taba Sepakat pada sektor pangan dan hortikultura menunjukkan alokasi pembiayaan yang cukup besar, di mana sektor pangan menerima dana sekitar Rp1,41 miliar dan sektor hortikultura sekitar Rp1,29 miliar. Besarnya pembiayaan pada kedua sektor tersebut mencerminkan fokus lembaga dalam mendukung kegiatan produksi pertanian utama, khususnya untuk memperkuat permodalan usaha tani dan meningkatkan keberlanjutan serta produktivitas agribisnis masyarakat (Lampiran 9).

Kondisi ini berkaitan erat dengan terjadinya bencana galodo (banjir bandang) yang secara langsung berdampak pada sektor pertanian. Kerusakan lahan, terganggunya proses produksi, serta menurunnya pendapatan petani menyebabkan berkurangnya kemampuan dan minat anggota LKM-A yang sebagian besar merupakan petani padi dalam mengakses pembiayaan. Di sisi lain, meningkatnya risiko gagal bayar mendorong LKM-A untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Secara keseluruhan, total pembiayaan yang disalurkan selama lima tahun terakhir mencapai Rp3.428.405.633, dan variasi persentase kenaikan dari tahun ke tahun mencerminkan kuatnya pengaruh kondisi lingkungan dan ekonomi terhadap dinamika penyaluran pembiayaan lembaga.

Kredit merupakan instrumen penting dalam meningkatkan input produksi dan penerapan teknologi budidaya. Peran pembiayaan dalam memperkuat usaha tani pangan dan hortikultura baru dapat berjalan efektif apabila kredit digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk pembelian sarana produksi dan tenaga kerja (Ashari, 2009).

Dalam upaya mengatasi keterbatasan tersebut, petani memanfaatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu sumber tambahan modal usaha. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan modal kerja sehingga seluruh kegiatan usahatani dapat berjalan dengan lebih baik. Namun, besarnya pembiayaan yang diterima belum tentu sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan modal usahatani. Di sisi lain, petani juga memiliki berbagai kebutuhan ekonomi lainnya yang harus dipenuhi, sehingga dana pembiayaan berpotensi dialokasikan tidak hanya untuk kegiatan usahatani, tetapi juga untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana alokasi penggunaan dana pembiayaan oleh petani dan apakah pembiayaan yang diberikan telah mampu memenuhi kebutuhan usahatani secara optimal. Informasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kecukupan pembiayaan dalam mendukung kegiatan usahatani sekaligus menjadi dasar dalam menilai efektivitas pembiayaan sebagai modal produktif bagi petani.

Petani sebagai pengelola rumah tangga dan usahatani secara bersamaan cenderung mengalokasikan dana berdasarkan prioritas kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Akibatnya, dana pembiayaan yang semula ditujukan untuk mendukung kegiatan usahatani dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai usaha lain, atau keperluan ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan tidak secara otomatis menjamin seluruh dana dimanfaatkan sebagai modal produktif dalam kegiatan usahatani.

Berdasarkan teori tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana pola alokasi penggunaan dana pembiayaan oleh petani. Analisis terhadap alokasi dana tidak hanya memberikan informasi mengenai proporsi dana yang digunakan untuk kegiatan usahatani, tetapi juga mampu menggambarkan sejauh mana tujuan pembiayaan sebagai penguat modal usaha telah tercapai. Apabila sebagian besar dana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor produksi, maka pembiayaan dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya sebagai modal produktif. Sebaliknya, apabila sebagian besar dana dialokasikan untuk kebutuhan di luar usahatani, maka efektivitas pembiayaan dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi menjadi perlu dievaluasi lebih lanjut.

Melihat berbagai persoalan yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana alokasi penggunaan kredit oleh para petani padi dan hortikultura anggota LKM-A Batu Taba Sepakat serta mengetahui bagaimana perbandingan produksi usahatani pangan dan hortikultura anggota LKM-A Batu Taba Sepakat sebelum menerima kredit dan setelah menerima kredit oleh LKM-A Batu Taba Sepakat.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana petani mengalokasikan dana pembiayaan yang diberikan LKM–A Batu Taba Sepakat?
2. Bagaimana perbandingan produksi usahatani sebelum menerima kredit dan setelah menerima kredit terhadap produksi usahatani anggota LKM-A Batu Taba Sepakat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Perbandingan Produksi Usahatani Sebelum Menerima Kredit dan Setelah Menerima Kredit terhadap Produksi Usahatani Anggota LKM-A Batu Taba Sepakat di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mendeskripsikan alokasi dana pembiayaan yang diterima oleh petani anggota LKM-A Batu Taba Sepakat pada sektor pertanian.
2. Menganalisis perbedaan rata-rata produksi usahatani pangan dan hortikultura sebelum menerima kredit dan setelah menerima kredit yang diberikan LKM-A Batu Taba Sepakat terhadap usahatani anggota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Kredit Terhadap Usahatani Anggota LKM-A Batu Taba Sepakat di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, khususnya petani di Nagari Batu Taba, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber wawasan tambahan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pemanfaatan kredit dari LKM-A Batu Taba Sepakat sebagai sumber modal untuk meningkatkan kinerja usahatani padi dan hortikultura. Informasi ini diharapkan dapat mendorong petani untuk lebih optimal dalam mengakses dan mengelola kredit, sehingga dapat memperbaiki produktivitas dan kesejahteraan mereka.
2. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, seperti LKM-A Batu Taba Sepakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam

merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penyaluran kredit untuk usahatani.

3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data dan informasi yang berguna untuk pengembangan kajian terkait pembiayaan pertanian serta pengaruhnya terhadap kinerja usahatani, khususnya di konteks daerah pedesaan seperti Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

